



Performance REPORT

2017



Performance

R E P O R T

2017





“ Kami terus mengembangkan dan konsisten melakukan perubahan-perubahan mendasar secara bertahap, untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

- Sri Sultan HB X -

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

P*erformance Report* Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2017 ini merupakan manifestasi simbolik dari komitmen akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017. Buku ini menjadi komitmen nyata untuk terus melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, yang memuat hasil analisis terhadap capaian sasaran pembangunan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Buku ini bertujuan memberikan informasi capaian kinerja secara terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemda DIY.

Pengukuran kinerja Pemda DIY Tahun 2017 berpijak pada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017. Dinamika pelaksanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 2017, sebagai tahun terakhir periode RPJMD 2012-2017, menunjukkan banyak sekali pencapaian sasaran, seperti: Peningkatan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Nilai Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK, *Load Factor* Angkutan Perkotaan, Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Meskipun demikian, harus diakui masih terdapat sejumlah kinerja yang capaiannya belum optimal, seperti: Ketimpangan Pendapatan, Ketimpangan Wilayah, dan Lama Tinggal Wisatawan. Berkaitan dengan hal tersebut, analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif menjadikan *Peformance Report* Tahun 2017 ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak, dan berkelanjutan.

Masukan konstruktif senantiasa terus diperlukan agar kualitas pembangunan ke depan menjadi semakin baik. Semoga buku ini memberikan kemanfaatan bagi siapa pun, untuk masa depan yang lebih baik.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

GOVERNOR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X



Daftar Isi

ج

Kata
Pengantar

1

Sepenggal Perjalanan
Masa Lalu

5

Tentang
Jogja

9

Kebudayaan Sebagai Pilar
Membangun Peradaban

13

Kemuliaan Martabat Manusia Jogja
Melalui Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Berkelanjutan

17

Potret
Kinerja Daerah

37

Sentuhan
Inovasi Daerah

43

Penutup

Sepenggal Perjalanan Masa Lalu



Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beserta peradabannya memiliki keistimewaan dan sejarah yang panjang, yakni membentang dari Dinasti Mataram Hindu, Mataram Islam, hingga era Keistimewaan modern saat ini. Karya peradaban Mataram Hindu, Mataram Islam dan era modern Republik Indonesia membentang dari Candi Borobudur, Candi Prambanan, hingga *landmark* Tugu Golong Gilig yang direvitalisasi sebagai bagian dari sumbu filosofis-sumbu imajiner Jogja. DIY modern saat ini, tumbuh berkembang dari semangat kemerdekaan yang tumbuh sejak akhir abad ke-16 di atas tanah perdikan yang dirintis oleh Ki Ageng Pemanahan beserta putranya, Panembahan Senopati. Tanah perdikan tersebut terus berkembang hingga menjadi Kerajaan Mataram Islam, yang keberadaannya tetap eksis hingga sekarang.

Seiring perjalanan waktu, terutama setelah Perjanjian Giyanti atau *Palihan Nagari*, wilayah Kasultanan Yogyakarta, sebagai penerus Kerajaan Mataram Islam, mengalami pasang surut. Meski demikian, kedaulatan Kasultanan Ngayogyakarta tetap dihormati sebagai daerah otonom, bahkan selama era kolonial penjajahan Belanda. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kontrak politik pada setiap bertahta-nya raja baru, Kasultanan

Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman diakui Pemerintah Kolonial sebagai daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Daerah Swapraja (*Zelfbestuurlandschappen*) yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.

Kemudian, ketika masa pendudukan Jepang, Kasultanan Ngayogyakarta juga tetap diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* (*Yogya-kooti*) dengan *Koo* sebagai kepalanya. Hingga berakhirnya pendudukan Jepang, Kasultanan maupun Kadipaten telah siap menjadi Negara sendiri yang merdeka lengkap dengan sistem pemerintahan (susunan asli), wilayah dan penduduknya. Alih-alih menjadi Negara merdeka, Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman justru mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang diproklamlirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta.

Dukungan lain Kasultanan Ngayogyakarta atas berdirinya NKRI ialah dengan mempersilahkan Yogyakarta menjadi ibukota negara saat kondisi Jakarta tidak kondusif akibat ancaman dari Pemerintah Belanda yang berniat kembali menguasai wilayah RI. Peristiwa penting lain ialah penyerahan kedaulatan secara simbolis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda pada tahun 1949 yang diwakili Sri Sultan HB IX dengan Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, H.J. Lovink di Jakarta.

1749

Mataram Islam

1755

Perjanjian Giyanti

Surakarta
Hadiningrat

Ngayogyakarta
Hadiningrat

- Perjanjian tersebut membagi Mataram Islam menjadi 2 bagian. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III, sementara Ngayogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah atau Sultan Hamengku Buwono I;
- Yogyakarta diakui kedaulatannya dan berhak mengatur pemerintahannya sendiri, baik ketika Masa Pendudukan Belanda –dengan diakuiinya sebagai Daerah Swapraja atau *Zelfbestuurlandschappen*–, maupun ketika Masa Pendudukan Jepang– dengan diakuiinya sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti*.

1945

Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman Mendukung dan Bergabung ke NKRI

1946

- Dengan bergabungnya Yogyakarta dalam NKRI maka menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI;
- Pada tahun 1946, Sri Sultan HB IX mempersilahkan Yogyakarta menjadi ibukota negara setelah kondisi Jakarta tidak kondusif.

1959

Disahkannya UU No.3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY

- Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman;

1998

Pisowanan Ageng

- Peneguhan posisi DIY sebagai wilayah pro reformasi yang dilakukan secara damai. Acara ini dihadiri ribuan masyarakat Yogyakarta.

2012

Disahkannya UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY

- Keistimewaan DIY dari keseluruhan berbagai aspek sosiologis, yuridis, politis dan historis serta kebudayaan.



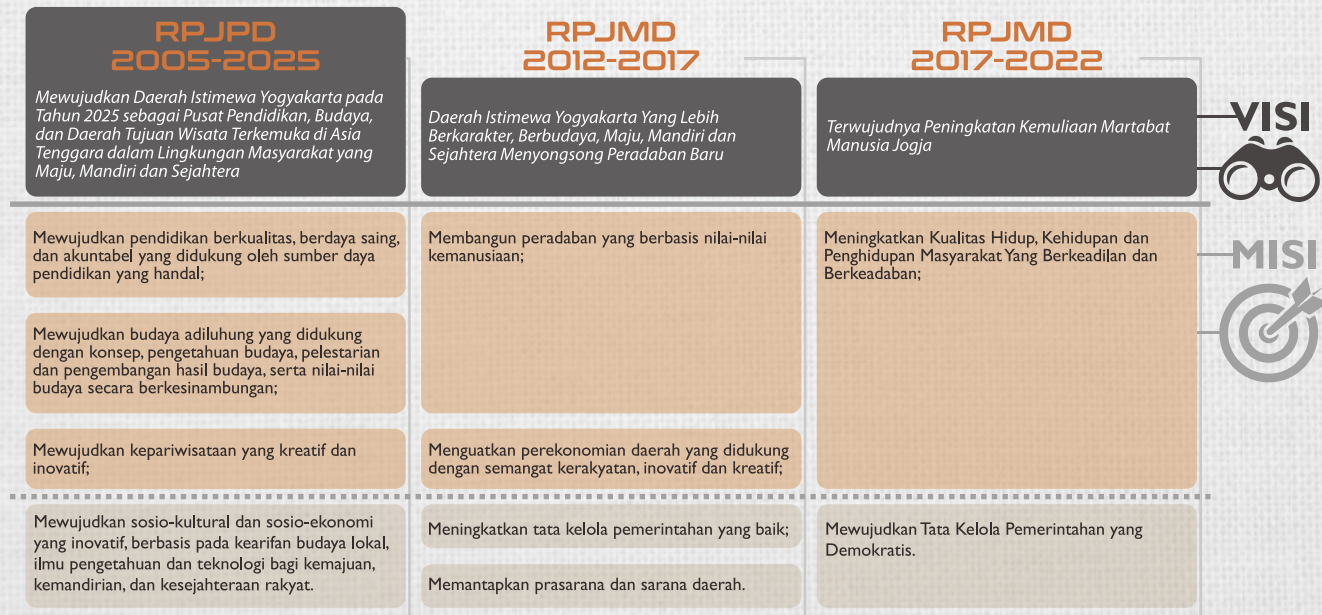
Menilik atas proses perkembangan tata pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melakukan transformasi dari tipe pemerintahan feodal-tradisional menjadi pemerintahan modern, menjunjung hukum dan demokratis. Sri Sultan HB X yang ditetapkan sebagai Gubernur DIY sejak 1998, melakukan perubahan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karenanya, Pemda DIY melakukan *affirmative action* dengan melakukan terobosan dalam melakukan reformasi terpadu pelayanan publik (*Integrated Civil Service Reform*; ICSR).

Reformasi birokrasi tersebut menghasilkan inovasi terkait penataan kepegawaian sesuai kompetensi (*rightsizing*), penyusunan standar pelayanan minimal, pengembangan *e-government* (*Blue Print Digital Government Services*, Jogjaplan, Jogja Dataku, implementasi

e-procurement, *e-SKP*, *e-performance based budgeting*, penerapan *standard operating procedure*, implementasi budaya kerja SATRIYA, dan lainnya.

Mengawali pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi semangat keistimewaan disusun RPJMD tahun 2012-2017 dengan visi yang mengacu pada penyampaian visi, misi, dan program calon Gubernur DIY tahun 2012-2017 dengan tema “Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru”.

Komitmen untuk merubah diri dan memperbaiki diri segenap masyarakat dan aparaturnya menuju kesejahteraan bersama senantiasa diungkapkan oleh Gubernur DIY dalam arahannya. Terlebih karena perubahan itu adalah tuntutan zaman, dan birokrasi harus dinamis serta beradaptasi dengan perubahan zaman.



Tentang Jogja



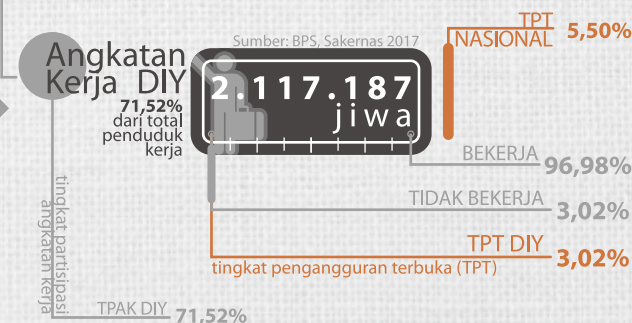
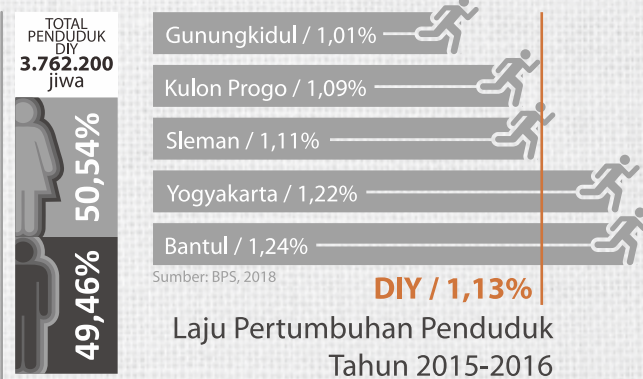
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki luas wilayah 3.185,80 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia. DIY berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia. DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, serta 4.508 pedukuhan. Kabupaten/Kota terluas adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.485,36 km² (46,62%), yang diikuti Kabupaten Kulon Progo 586,27 km² (18,4%), Sleman 574,82 km² (18,04%), Bantul 506,85 km² (15,91%) dan terkecil adalah Kota Yogyakarta seluas 32,50 km² (1,02%).

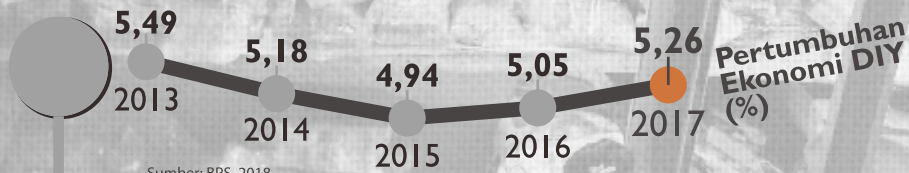
Ketenagakerjaan

Penduduk DIY yang didominasi oleh penduduk usia kerja merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan sekaligus menjadi tantangan untuk menciptakan lapangan usaha yang dapat menampung tenaga kerja tersebut. Jumlah angkatan kerja DIY pada tahun 2017 sebanyak 2.117.187 jiwa.

Demografi

Penduduk DIY pada tahun 2017 sebanyak 3.762.200 jiwa. Penduduk DIY yang bermukim di Kabupaten Sleman sebanyak 1.180.479 jiwa (31,73%), Kabupaten Bantul 983.527 jiwa (26,43%), Kabupaten Gunungkidul 722.479 jiwa (19,42%), Kota Yogyakarta 417.744 jiwa (11,23%), dan Kabupaten Kulon Progo 416.683 jiwa (11,20%).





Sumber: BPS, 2018



Sumber: BPS, 2018

Rp81.688.214jt.
(ADHB 2017)
Rp55.533.017jt.
(ADHK 2010)

Perekonomian Daerah

Perekonomian DIY meskipun fluktuatif tetapi tumbuh dengan baik. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49%, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,94% pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,26%, lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 5,05%.

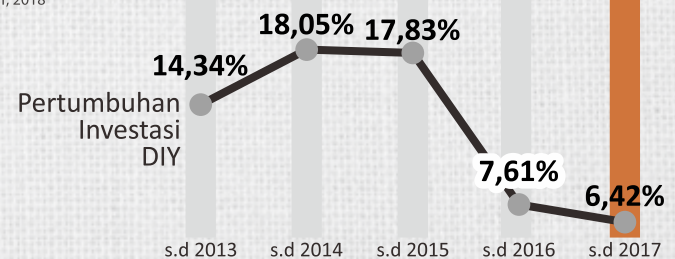
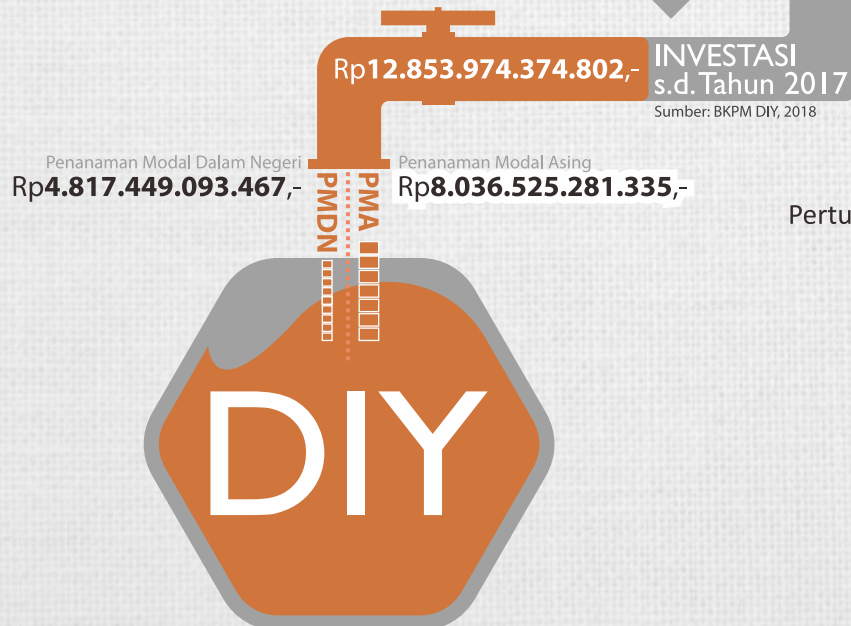
Kinerja pertumbuhan beberapa sektor pembentuk PDRB mengalami pertumbuhan positif. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi, yaitu sebesar 6,94%. diikuti dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,21%, serta informasi dan komunikasi sebesar 6,14%.

Nilai PDRB nominal atau atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai 119.172.906 juta rupiah. Sedangkan nilai PDRB rill atau atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar 92.300.660 juta rupiah. Nilai dan laju pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran pada 2016 dan 2017, kontributor terbesar adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga.


Investasi

Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Tahun 2017 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 6,42%. Adapun jumlah Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 345 perusahaan, yang terdiri dari 183 PMA dan 162 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 54.247 TKI dan 222 TKA.

Upaya meningkatnya nilai investasi pada tahun 2017 salah satunya dengan pengembangan dan pengelolaan website *Jogja Invest* sebagai media yang efektif dan efisien untuk sosialisasi dan informasi potensi investasi di DIY. Selain itu diadakan pameran investasi di dalam negeri, pameran potensi unggulan daerah dan temu investor.



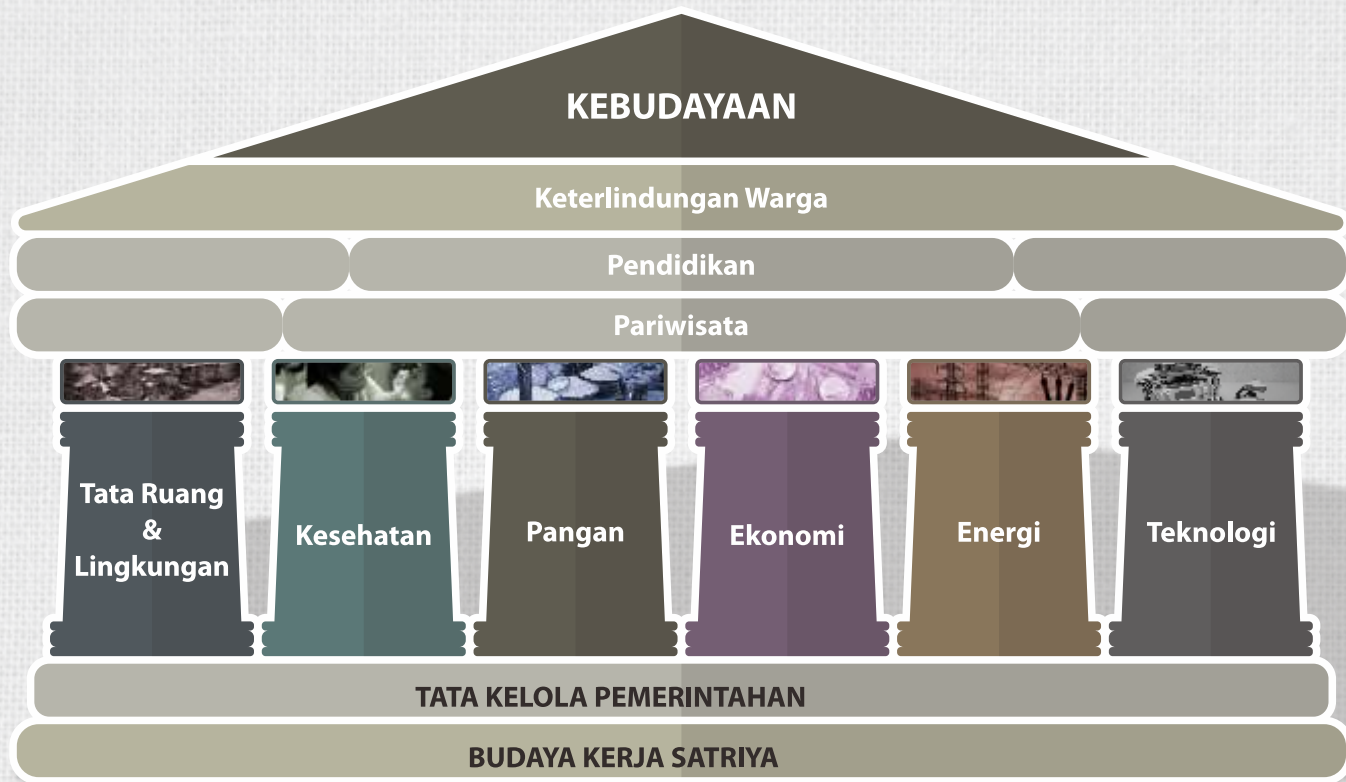
Sumber: BKPM DIY, 2018



Kebudayaan sebagai Pilar Membangun Peradaban

Kebudayaan sebagai payung untuk semua sektor pembangunan di DIY dan menjadi spirit dengan meletakkan konsep Renaisans Yogyakarta sebagai paradigma Pembangunan. Konsep Renaisans Yogyakarta merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti*), Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan *etos aseli* (*Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh*) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. Renaisans Yogyakarta diwujudkan dengan semangat kolektif *Jogja Gumregah* untuk bergerak bersama membawa Kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Semangat *Jogja Gumregah* tersebut dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju ke peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai *"trust"*, dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Konsep Renaisans Yogyakarta dan semangat *Jogja Gumregah* tersebut dikemukakan Gubernur DIY dalam paparan visi dan misi periode 2017–2022 pada tanggal 2 Agustus 2017, dalam pidatonya mengambil tema *"Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"*. Tema tersebut mengandung makna pembangunan yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu, strategi kebudayaan meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat serta mengentaskan kemiskinan di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.



Upaya untuk meningkatkan harkat, martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas. Etos menyanggah pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai “karya peradaban”, yang menyanggah

arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah “karya peradaban”. Etika, menyanggah pesan “kemuliaan” dalam pengertian bersatunya “pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia”, dalam rangka menciptakan SDM yang “berintegritas” yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, menyanggah pesan adanya pergeseran

mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai “karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran”, melainkan menuju pada pembentukan “sikap” bahwa karya birokrasi DIY adalah “karya yang dapat menjadi rujukan” bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga lain di luar DIY. Ketika karya tersebut menjadi rujukan, maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil karya yang “diniati” untuk menjadi “karya berkualitas tinggi”.

Kebudayaan yang bersifat dinamis yang saling berhadapan antara interaksi alam dan zaman, kodrat dan masyarakat, kekuatan alam-kodrati dan tuntutan perkembangan masyarakat bangsa, menjadikan kebudayaan penuh cerita tentang perubahan-perubahan yang memberi inspirasi baru terhadap pola-pola kebudayaan yang sudah ada, termasuk warna pada setiap sektor kehidupan dalam perspektif kebudayaan sebagai pilar pembangunan daerah.





Kemuliaan Martabat
Manusia Jogja
Melalui Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Berkelanjutan



Visi pembangunan daerah DIY pada 2017-2022 adalah "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Adapun sebagian misi untuk mencapai hal itu yang memiliki kaitan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tema "Abad Samudera Hindia", secara tegas meneguhkan kembali sumbu imajiner Gunung Merapi-Laut Kidul, yang memiliki makna dan ajaran harmoni kosmos, dalam pengertian bahwa bentang ruang wilayah Yogyakarta mulai dari Puncak Gunung Merapi di Sleman sampai ke Bibir Pantai dan Lidah Air Laut Kidul, merupakan suatu kesatuan bentang ruang ekologis, yang harus diperlakukan secara utuh. Sehingga perlakuan pembangunan di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta harus memiliki "tenggang

ekologis" dengan wilayah Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo. Demikian pula sebaliknya, perlakuan pembangunan di wilayah Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo harus memiliki "rujuk ekologis" dengan wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk itulah, filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*, yang analog dengan konsep *Sustainable Development*, sangat relevan dan sangat diperlukan untuk *Hamemayu Hayuning Ngayogyakarta Hadiningrat*.

Semangat reformasi berkelanjutan yang digulirkan, telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran serta keterpaduan pelaksanaan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, juga dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public good and services*. Agar dapat menjadi kenyataan dituntut adanya: *alignment* yang baik, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari segenap pelaksananya.

Reformasi yang digulirkan Pemda DIY diharapkan menjadi momentum yang tepat dalam menyikapi tuntutan masyarakat. Program ini membutuhkan komitmen dan keteladanan pada level pimpinan satuan kerja, perbaikan sistem dan struktur baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan pelaksanaan budaya pemerintahan yang menjadi dasar budaya kerja birokrasi. Adanya dukungan pengelolaan manajemen sistem *e-performanced based goverment* membuat sistem pelaksanaan birokrasi diharapkan menjadi semakin berkualitas, transparan, responsif, kokoh, dan kuat serta ditambah dengan model *Leadership and Human Resources* sebagai penyangga. Pilar bangunan yang diperkuat penyangga, ditambah lagi dengan payung yang berisi strategi, sistem, dan *policy* yang jelas, menjadikan strategi reformasi (budaya organisasi reformatif) semakin kokoh.

Isu Strategis REFORMASI BIROKRASI

KEBERLANJUTAN

Refomasi birokrasi merupakan perjalanan yang dilakukan tahap demi tahap, agar perubahan itu bisa disadari oleh semua tingkatan dari pimpinan hingga level staf pada semua sektor.

BERORIENTASI HASIL

Refomasi birokrasi memiliki hasil yang terukur untuk menjawab tantangan pembangunan daerah

Dengan sistem birokrasi baru, harapan yang ingin diwujudkan adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, akuntabel dan transparan, berorientasi bisnis, efektif dan menguntungkan, organisasi kecil yang berkualitas, orientasi teknologi, kecepatan dengan tingkat akurasi yang efektif, dan manajemen berdasarkan hasil kinerja yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, perbaikan dilakukan secara bertahap melalui: Advokasi budaya *entrepreneurship*, branding "Jogja Istimewa" (*tourism marketing strategy*), kerjasama inter dan intra regional, identifikasi kelompok muda yang mempunyai integritas tinggi pada pelayanan masyarakat, dan menyusun kebijakan yang berorientasi penurunan kemiskinan dan penurunan ketimpangan.



MANAJEMEN KEPEMIMPINAN

Pemimpin yang dapat memberikan inspirasi dan teladan bagi yang lain, membangun sistem dan mengarahkan segenap langkah bersama menuju perubahan yang diinginkan

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagai warga negara



Potret Kinerja Daerah

“ Saya berkeyakinan bahwa, tidak cukup membangun sistem yang terintegrasi dengan dukungan perangkat dan *expert* yang berkualitas belaka, melainkan hal yang lebih penting adalah adanya keberlanjutan dalam mengelola sistem dimaksud secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan segenap aspek pemerintahan.

- Sri Sultan HB X -

A. Capaian Kinerja

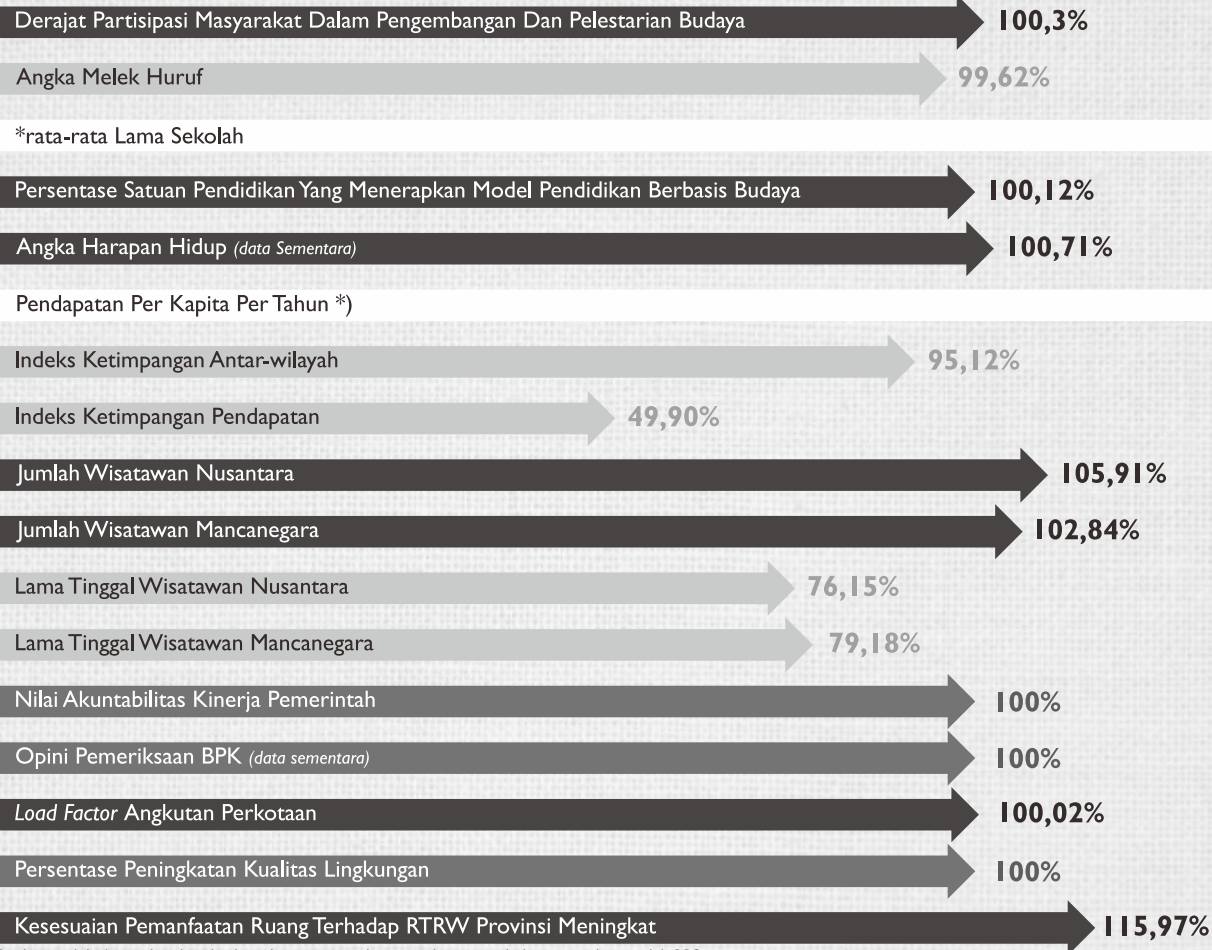
Tahun 2017 merupakan fase akhir dari pelaksanaan RPJMD DIY 2012-2017. Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Untuk mewujudkan cita-cita sesuai dengan tahapan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD DIY 2012-2017, pelaksanaan tahun 2017 dimaknai sebagai *Renaissance Jogja* yang mengacu pada konsep *aworing kawula gusti* dan *golong-gilig*, serta diekspresikan oleh sikap satria: *sawiji, greget, sengguh ora-mingkuh*, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan. Renaissance DIY dilakukan dengan 9 strategi (pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan), memberikan perspektif paradigma pembangunan baru untuk mewujudkan DIY dalam membangun peradaban baru yang unggul dengan strategi budaya : membalik paradigma "*among tani*" menjadi "*dagang layar*", dari pembangunan

berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dicita-citakan telah ditetapkan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya dalam RPJMD DIY Tahun 2012-2017.



CAPAIAN
Indikator
Kinerja
Sasaran
Pemda DIY
Tahun 2017



keterangan: *) Realisasi tidak dapat diperbandingkan dengan target karena adanya perubahan pengukuran oleh BPS

Sesuai dengan *review* terhadap RPJMD DIY 2012-2017 dengan adanya perubahan kelembagaan dan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, telah dilakukan beberapa penyesuaian target

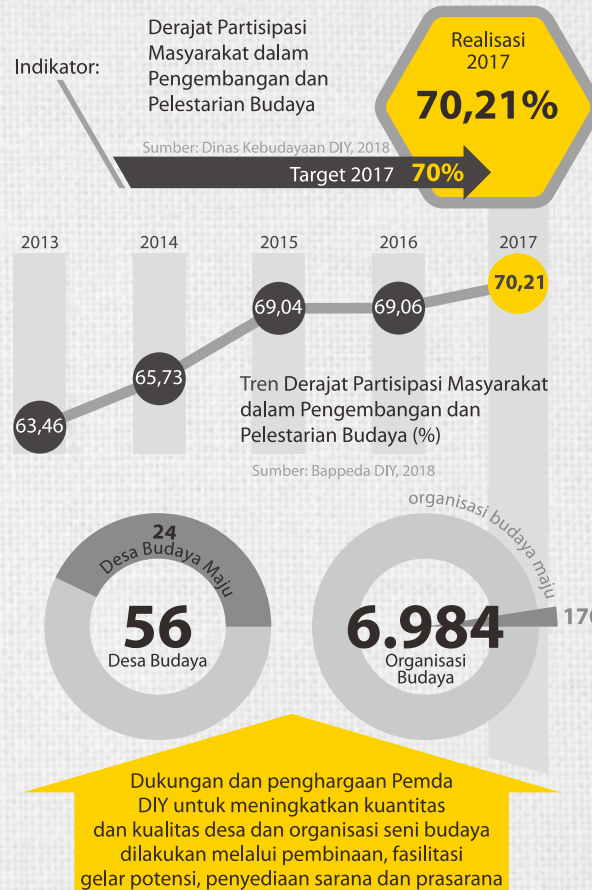
indikator pada Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY terutama pada tahun 2016 hingga 2017, agar pengelolaan pemerintahan lebih akuntabel, transparan, dan lebih meningkatkan layanan publik.

1. Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan

Kebudayaan sebagai *mainstream* di segala bidang menjadi spirit pembangunan di DIY. Membangun kebudayaan berarti merajut nilai-nilai luhur warisan masa lalu yang dipadukan dengan masa kini dan masa mendatang. Kebudayaan sebagai investasi jangka panjang suatu daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kebudayaan sehingga peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya sangat berpengaruh pada peningkatan keberhasilan pencapaian sasaran pengembangan dan pelestarian budaya.

Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan diukur dengan indikator Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya yang dipotret dari desa budaya maju dan organisasi budaya yang tumbuh dan berkembang.

Warisan budaya DIY mendapat apresiasi nasional dengan dimasukkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Dari 23 warisan budaya yang diusulkan, yang lolos ada 18, sehingga pada tahun 2017 telah terdapat 40 ragam budaya DIY yang menjadi warisan budaya tak benda nasional.



Desa Budaya Maju adalah desa yang telah hadir dengan eksistensi yang kuat dan mampu mengeksplorasi serta mengelola potensi budaya yang dimilikinya melalui kerja yang terorganisasi, tersistem dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa/kelurahan.

Organisasi Budaya Maju adalah Organisasi Budaya yang mempunyai kiprah dan prestasi di level internasional, nasional atau lokal. Selain itu organisasi tersebut mampu hidup dan berkembang secara mandiri.

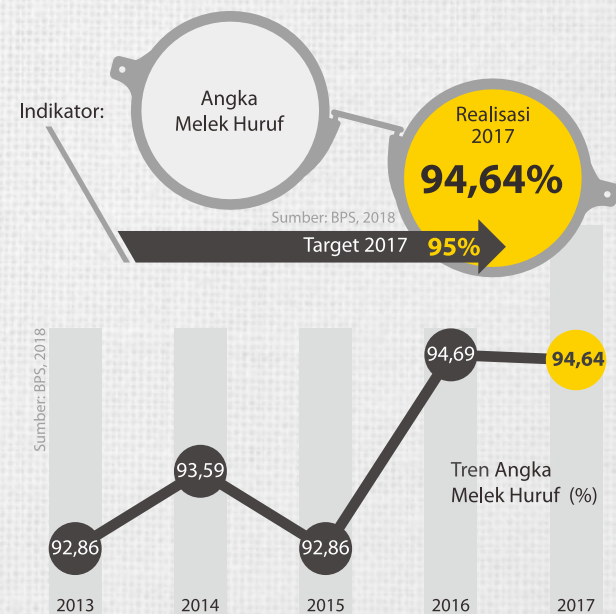
Tahun 2017, Sumbu Filosofi (Tugu-Kraton-Panggung Krapyak) masuk pada daftar *Tentative List United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), sebagai salah satu calon warisan budaya dunia.

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya antara lain: (1) Belum semua organisasi seni budaya memiliki dokumen administrasi dan legalitas sehingga belum dapat difasilitasi oleh Pemda; (2) Kapasitas produksi industri barang bercorak kebudayaan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; (3) Cepatnya perkembangan perkotaan mengancam keberadaan aset-aset budaya; dan (4) Kecenderungan masyarakat untuk mengembangkan seni budaya secara monoton. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk perbaikan ke depan, yaitu: (1) Sosialisasi kepada organisasi seni budaya agar persyaratan administrasi dan legalitas organisasi dapat terpenuhi, dan lebih maju tata kelolanya; (2) Percepatan penciptaan teknologi produksi dan pendekatan kepada pelaku-pelaku industri barang bercorak kebudayaan agar termotivasi untuk lebih produktif; (3) Penegakan hukum pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya dan warisan budaya; dan (4) Pengenalan dan pengembangan keragaman budaya DIY yang jarang dipertontonkan oleh masyarakat.

2. Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkat

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM yang diukur salah satunya dengan Angka Melek Huruf (AMH).

Tantangan untuk pengentasan buta huruf ada pada usia 45 tahun ke atas khususnya untuk masyarakat lansia. Di sisi lain, buta aksara banyak dialami oleh Anak Berkebutuhan Khusus



(ABK). keterbatasan sarana prasarana pembelajaran dan SDM pendidik menyebabkan ABK belum mendapatkan pendidikan khususnya keaksaraan secara optimal.

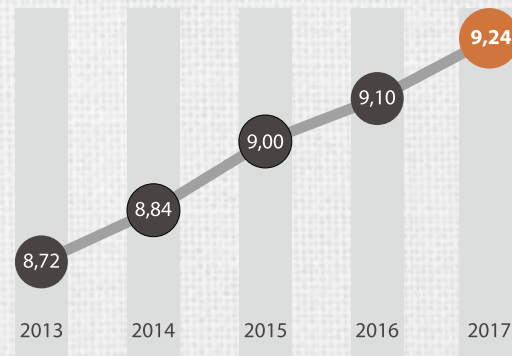
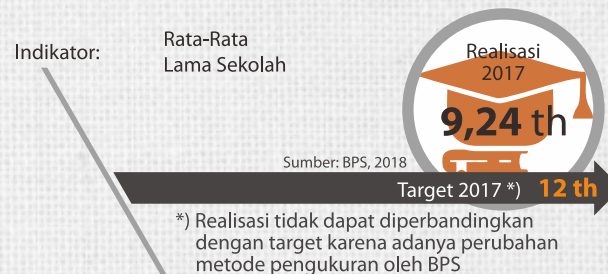
Penurunan realisasi AMH menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pada pembelajaran formal maupun nonformal. Perhatian khusus terkait peningkatan AMH perlu diberikan pada anak-anak berkebutuhan khusus usia sekolah melalui pemberian pendidikan inklusif serta para penduduk usia dewasa ataupun yang telah lanjut usia. Bagi mereka perlu diberikan bimbingan khusus dalam penuntasan buta aksara sehingga AMH bisa ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

3. Sasaran Aksesibilitas Pendidikan Meningkat

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Belum tercapainya kinerja rata-rata lama sekolah menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang pendidikan menengah sekaligus perlunya dukungan pemerintah daerah dalam penuntasan wajib belajar hingga 12 tahun. Salah satu dukungan

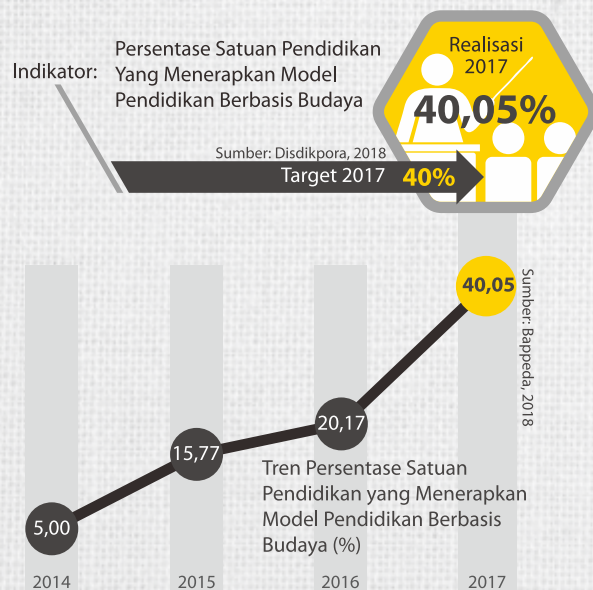
yang telah diberikan kepada masyarakat guna penuntasan wajib belajar 12 tahun adalah penambahan alokasi pendanaan yang digunakan untuk biaya operasional sekolah sehingga diharapkan biaya operasional sekolah tidak lagi membebani orangtua siswa.



- ! Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
- Perubahan metode penghitungan oleh BPS, yaitu bahwa pada tahun 2016 RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan sebelum tahun 2016 RLS didasarkan pada penduduk usia 15 tahun ke atas.

4. Sasaran Daya Saing Pendidikan Meningkatkan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya yang dihitung dari Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan yang berbasis budaya. Wujud implementasi sekolah berbasis budaya antara lain terintegrasinya aspek kebudayaan pada pembelajaran, pemenuhan sarana prasarana kebudayaan, dan adanya aktivitas kebudayaan di dalam sekolah.



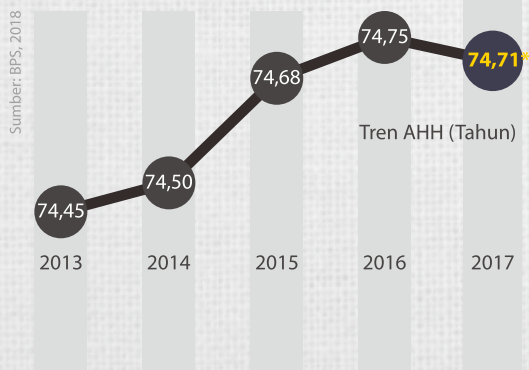
Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Gubernur DIY No. 66 tahun 2013 tentang Kurikulum pendidikan Berbasis Budaya, serta Buku-buku Pedoman Pelaksanaan pendidikan berbasis budaya. Pembinaan muatan lokal bagi guru dan peserta didik secara rutin dilakukan melalui Seniman Mengajar, pembangunan laboratorium seni budaya, dukungan untuk pembangunan ruang pertunjukan dan revitalisasi sekolah seni di Yogyakarta. Penyempurnaan pembangunan Akademi Komunitas untuk memperluas aksesibilitas pendidikan seni dan budaya.

Dalam mewujudkan sasaran Daya Saing Pendidikan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) Sinergitas tripilar pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga belum optimal, sehingga belum semua aspek pendidikan basis budaya dapat tersentuh; (2) Kapasitas produksi industri barang bercorak kebudayaan belum memenuhi kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan; dan (3) Ketidaksiapan satuan pendidikan untuk pembangunan laboratorium seni budaya. Sedangkan upaya yang perlu dilakukan, yaitu:

(1) Optimalisasi peran tripilar pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan basis budaya; (2) Penciptaan teknologi produksi dan pendekatan kepada pelaku-pelaku industri barang bercorak kebudayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi; dan (3) Mendorong satuan pendidikan untuk mempersiapkan sejak dini untuk pembangunan laboratorium seni budaya.

5. Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Angka Harapan Hidup (AHH) dapat dipergunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Capaian AHH juga merupakan salah satu komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Oleh sebab itu, tingginya AHH turut mempengaruhi capaian IPM dan



DIY Tahun 2017 ■■■

IPKM DIY. Pada tahun 2016, DIY memiliki IPM terbaik ke dua (78,38) di Indonesia setelah DKI Jakarta (79,60). Sementara dari data terakhir IPKM tahun 2013, DIY berada pada posisi terbaik keempat nasional, dengan keunggulan pada indikator kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat dan penyakit menular.

Permasalahan terhadap peningkatan harapan hidup adalah meskipun AHH di DIY tinggi tetapi dihadapkan pada ancaman pola hidup di era modern yang cenderung tidak sehat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya gangguan kesehatan dan penyakit tidak menular di DIY. Di samping itu penyakit menular juga belum mampu tereliminir secara maksimal. Solusi atas permasalahan tersebut yaitu peningkatan upaya kesehatan preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif, dengan prioritas pada promosi kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS). Di samping itu dikembangkan kembali penyesuaian tradisional.

6. Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat

Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan dan tingkat kemakmuran suatu perekonomian. Semakin meningkat pendapatan per kapita mengindikasikan peningkatan kemakmuran masyarakat suatu daerah.

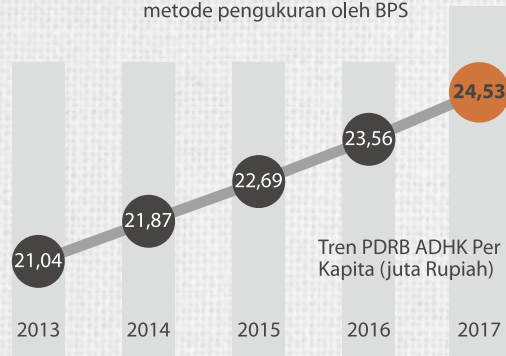


Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir dihitung berdasarkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Dari hasil proyeksi, tahun 2010-2035 AHH DIY berada pada posisi tertinggi secara nasional. (Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035)



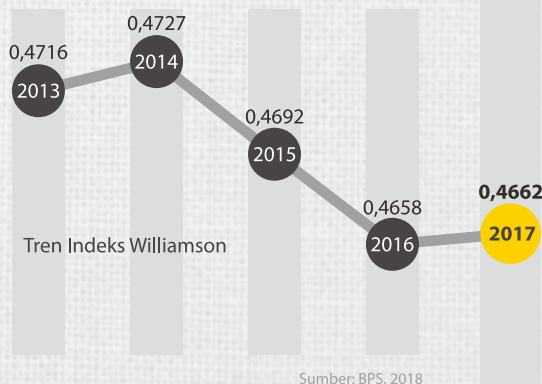
*) Realisasi tidak dapat diperbandingkan dengan target karena adanya perubahan metode pengukuran oleh BPS



Tren Peningkatan Pendapatan Per Kapita tahun 2017 menunjukkan bahwa kemakmuran masyarakat DIY secara rata-rata senantiasa mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita tahun 2017 meningkat karena pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26% yang lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk sebesar 1,11%. Pertumbuhan pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan sejak tahun 2015. Pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2017 meningkat menjadi 4,12% dari tahun 2016 yang sebesar 3,83%.

Pendapatan per kapita masyarakat DIY secara rata-rata meningkat, namun peningkatan tersebut tidak dinikmati secara merata antar kabupaten/kota. Ketidakmerataan tersebut ditunjukkan dengan indikator ketimpangan wilayah (Indeks Williamson). Di masa mendatang pemerintah DIY akan terus berupaya untuk meratakan aktivitas ekonomi terutama dengan meningkatkan dinamika ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal.

7. Sasaran Ketimpangan Antar Wilayah Menurun



Peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu dinikmati secara merata oleh seluruh wilayah di daerah. Untuk itu, indikator pemerataan kinerja ekonomi harus juga diperhatikan untuk memastikan apakah kesejahteraan ekonomi dirasakan secara merata. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar-wilayah adalah Indeks Williamson.

Kecenderungan penurunan Indeks Williamson menunjukkan bahwa pendapatan antar-wilayah se-DIY semakin merata karena pemerataan pembangunan antar-kabupaten dan kota yang menyertai pertumbuhan ekonomi.

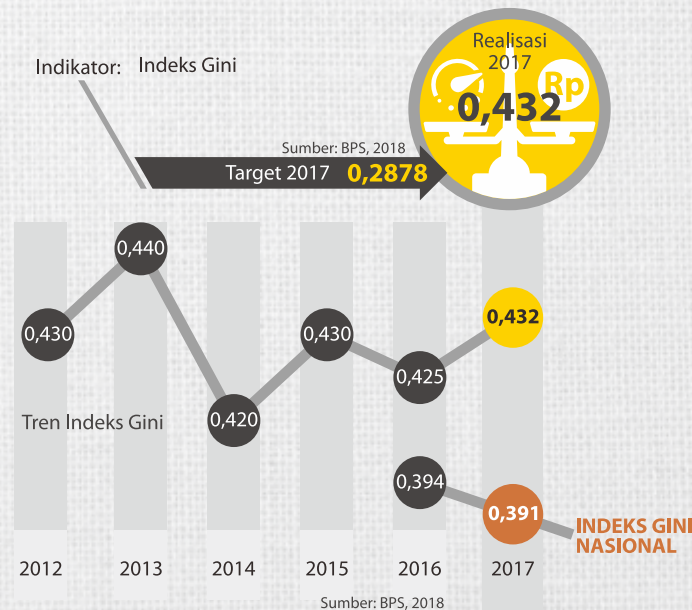
Ketimpangan antar-kabupaten dan kota masih terjadi karena tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih kuat secara ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lebih lemah. Selama empat tahun sejak tahun 2012 tingkat pertumbuhan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang masing-masing sumbangan rata-rata terhadap PDRB DIY (2012-2016) sebesar 33,4% dan 26,4% lebih tinggi dibandingkan tiga kabupaten lainnya.

Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perlu upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota dengan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama di daerah-daerah yang tertinggal.

8. Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun

Dari tahun ke tahun, ekonomi DIY tumbuh dan dibarengi dengan peningkatan pendapatan per kapita. Namun, peningkatan kemakmuran ekonomi tersebut belum dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat, yang ditunjukkan dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan suatu perekonomian diukur dengan Indeks Gini.

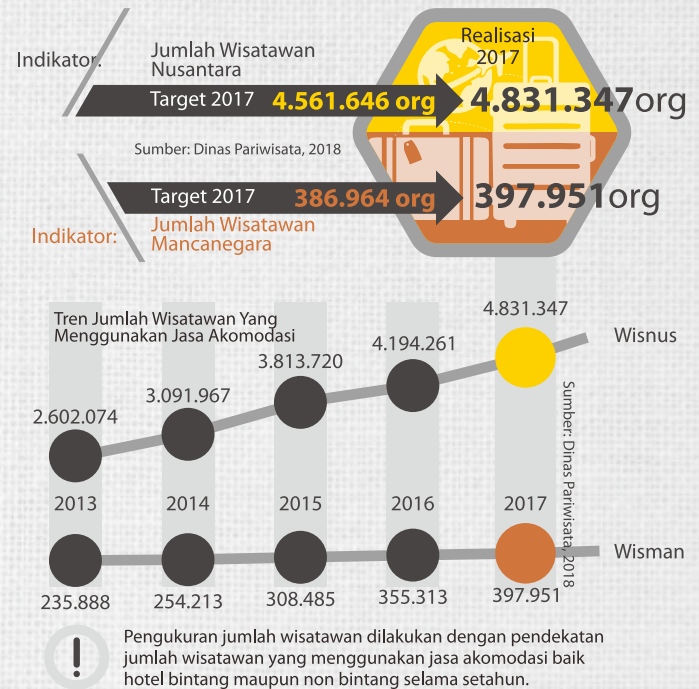
Peningkatan ketimpangan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat berpendapatan tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat rendah.



Ketimpangan pendapatan terjadi karena 20% kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi menikmati proporsi pendapatan yang meningkat. Sementara itu, 40% masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan proporsi pendapatan yang semakin sedikit. Upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan adalah meningkatkan produktivitas masyarakat berpendapatan rendah agar proporsi pendapatannya dapat meningkat.

9. Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat

Kinerja kunjungan jumlah wisatawan, baik Wisatawan Mancanegara maupun Nusantara, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dapat terealisasi di atas 100%. Dari sisi penawaran, pencapaian ini tidak lepas dari peningkatan daya tarik wisata baik berupa destinasi maupun *event* pariwisata. Dalam Anugerah Pesona Indonesia 2017, beberapa destinasi wisata di DIY memenangkan dalam berbagai kategori seperti Wanawisata Budaya Mataram (juara dua kategori surga tersembunyi terpopuler), Pantai Wediombo (juara dua tempat berselancar terpopuler), Kalibiru (juara tiga kategori dataran tinggi terpopuler), Tebing Breksi (juara satu tujuan wisata baru terpopuler), Kampung Wisata Mangunan (juara tiga kampung adat terpopuler), Gua Jomblang (juara satu obyek wisata unik terpopuler).



Peningkatan jumlah wisnus didorong oleh perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat serta semakin terbukanya berbagai pilihan moda transportasi menuju DIY. Kunjungan wisatawan berdampak pada kebutuhan akan peningkatan kapasitas destinasi wisata. Analisis dari lembaga survei INRIX yang melakukan survei kepadatan lalu lintas pada 100 kota di dunia, menyebutkan Kota Yogyakarta menempati peringkat keempat sebagai kota

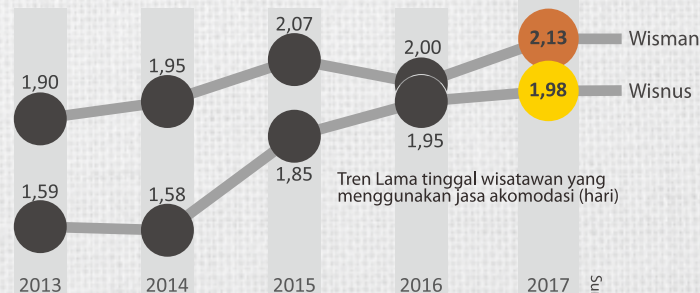
termacet di Indonesia pada tahun 2017. Hal ini tentu perlu ditindaklanjuti dengan rekayasa alur transportasi wisatawan dan manajemen pengelolaan destinasi. Pengembangan daya tarik di luar kawasan perkotaan diperlukan untuk memecah konsentrasi kunjungan di wilayah perkotaan.

Di sisi lain, seiring kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, Pemda di koridor Jogja-Solo-Semarang atau Joglosemar diharapkan mendukung target peningkatan kunjungan wisman. Kawasan Joglosemar ditargetkan mampu mendatangkan sebanyak dua juta wisman pada tahun 2019. Berbagai upaya akan terus dilakukan sebagai upaya akselerasi pertumbuhan jumlah wisman, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan *event* yang potensial diangkat ke level internasional seperti *event* *Jogja Air Show*, *Jogja International Street Performance* dan *Jogja International Heritage Walk*.

10. Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat

Lama tinggal wisatawan baik Mancanegara maupun Nusantara mencapai tingkat yang tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. Lama tinggal untuk wisman mencapai 2,13 hari pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 6,5%

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk lama tinggal wisatawan nusantara tumbuh 1,5% dari tahun sebelumnya dan mencapai 1,98 hari. Capaian tersebut memang belum sepenuhnya memuaskan. DIY sebagai destinasi wisata belum dapat berdiri sendiri dan masih memiliki keterkaitan yang kuat dengan destinasi lain. Pola perjalanan wisatawan mancanegara misalnya, menempatkan DIY sebagai salah satu titik pemberhentian sebelum melanjutkan ke destinasi lain seperti Bali atau Indonesia bagian timur. Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan lama tinggal adalah dengan strategi diversifikasi produk wisata dan pengembangan paket-paket wisata.



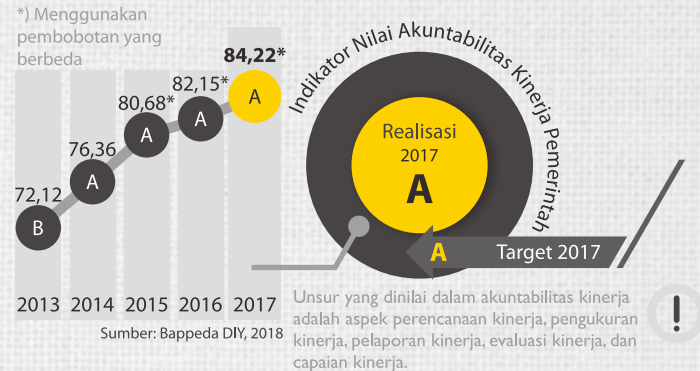
Lama tinggal wisatawan merupakan rata-rata dari jumlah hari yang dihabiskan wisatawan berada di suatu daerah. Sebagai bentuk pendekatan, lama tinggal wisatawan diperoleh dari rata-rata lama tamu menginap di jasa akomodasi baik hotel bintang maupun non bintang. Lama tinggal wisatawan diperoleh dari pembagian jumlah total malam yang dihabiskan oleh tamu dengan jumlah tamu yang datang.

Meskipun durasi kunjungan wisatawan masih belum optimal, dari aspek pembelanjaan wisatawan mengalami peningkatan. Berdasarkan survei analisis belanja wisatawan, diperoleh bahwa jumlah belanja wisatawan di DIY meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata belanja wisatawan nusantara sebesar Rp1.889.363,00 per kunjungan atau naik sebesar 22%. Sementara itu, rata-rata belanja wisman mencapai sebesar US\$828,23 atau naik sebesar 14%.

11. Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

A kuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilaksanakan atas semua kegiatan utama Pemda yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pemda. Tujuannya adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemda sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Pemda DIY tahun 2017 memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 84,22 (predikat A). Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di DIY sudah menunjukkan hasil yang baik.



Sejumlah upaya yang dilaksanakan Pemda DIY untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yaitu:

- Secara umum Pemda DIY telah menerapkan budaya kinerja;
- Merumuskan *cascading* kinerja dengan menggunakan metode *logic model* yang menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran.
- Secara formal dan berjenjang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (*core business*) atau sasaran strategisnya.

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di DIY, beberapa catatan untuk perbaikan ke depan, antara lain: (1) RPJMD dijadikan dasar atau acuan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah; (2) Memastikan keselarasan kinerja (*Performance Alignment*) mulai dari RPJMD, Renstra OPD, hingga kinerja

individu; (3) Menjadikan kinerja yang akan diwujudkan sebagai dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi, struktur organisasi OPD dan standar kompetensi pegawai; (4) Integrasi sistem mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Upaya yang perlu dilakukan berikutnya adalah penyusunan organisasi dengan mengacu pada perencanaan strategis, mendorong perumusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang mencerminkan kinerja secara faktual, serta mengintegrasikan sistem-sistem informasi yang ada.

12. Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat

Opininya Pemeriksaan BPK menjadi indikator dari Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemda. Dengan hasil Opini Pemeriksaan BPK pada tahun 2016 adalah WTP, maka Pemda DIY sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 atau selama 7 tahun berturut-turut berhasil meraih dan mempertahankan nilai WTP.



Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan opini WTP:

- (1) Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;
- (2) Memantapkan implementasi sistem akrual basis dalam penatausahaan keuangan serta peningkatan kapasitas SDM; dan
- (3) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal.

Permasalahan yang masih dihadapi DIY dalam akuntabilitas keuangan antara lain masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal atas Laporan Keuangan Pemda diantaranya: (1) Belum adanya SOP pengesahan penerimaan dan penggunaan atas dana bantuan yang langsung diterima oleh OPD dan (2) Penentuan standar harga satuan harga perjalanan dinas belum memadai. Adapun solusi ke depan yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal atas Laporan Keuangan Pemda diantaranya dengan: (1) Menyusun SOP pengesahan penerimaan dan penggunaan atas dana bantuan yang langsung diterima oleh OPD; dan (2) Perbaikan perumusan standar harga satuan harga perjalanan dinas.

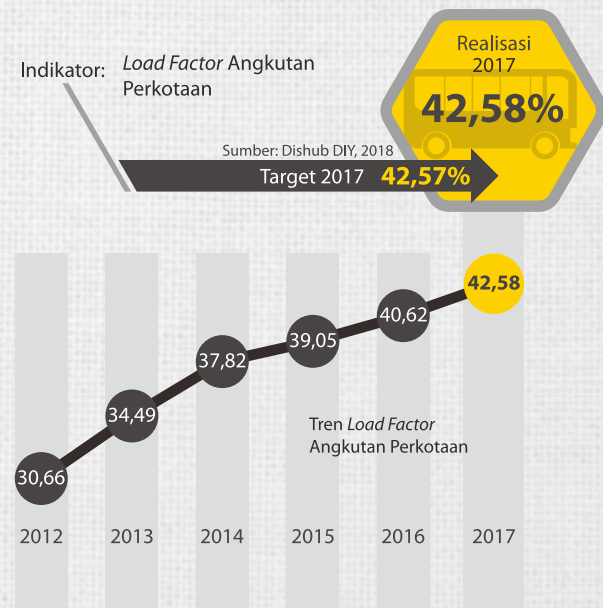
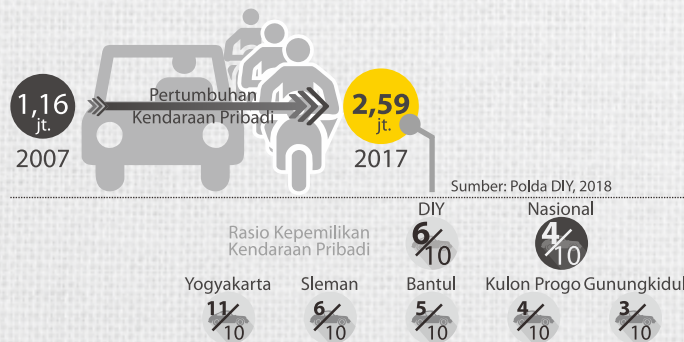
13. Sasaran Layanan Publik Meningkat, Terutama pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Perdesaan

Pola pergerakan masyarakat di DIY masih terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan adanya pola arus lalu lintas yang bersifat ulang alik, dengan ciri khusus arus lalu lintas besar menuju pusat kota pada pagi hari dan sebaliknya pada sore hari. Kondisi ini diperparah dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang sangat tinggi.

Arah kebijakan yang telah dilakukan pada sektor angkutan publik khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta salah satunya adalah dengan mengoperasikan Bus Trans-Jogja dengan sistem *buy the service*, menjadikannya salah satu angkutan umum perkotaan bersubsidi yang dinilai cukup baik di tingkat

nasional. Selain itu, meningkatkan penataan sistem transportasi di DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan.

Tingkat keterisian penumpang angkutan umum mengalami kenaikan disebabkan karena pola perjalanan penumpang yang bersifat "*captive users*", dimana penumpang yang berpola perjalanan jauh (di atas 5 km) masih tercatat dan terakumulasi dalam nilai *load factor*.



Faktor-faktor penghambat dalam penataan sistem transportasi antara lain: a) Kemacetan lalu lintas yang bertambah tiap tahun berdampak secara langsung terhadap penurunan *reliability* atau keandalan waktu tempuh angkutan umum, karena sifat operasional angkutan umum di DIY masih menyatu dengan lalu lintas lainnya atau tidak memiliki prioritas baik secara sistem maupun secara fisik prasarana; b) Berkembangnya angkutan alternatif yang secara signifikan berpengaruh terhadap penumpang Trans-Jogja yang bersifat *non-captive*.

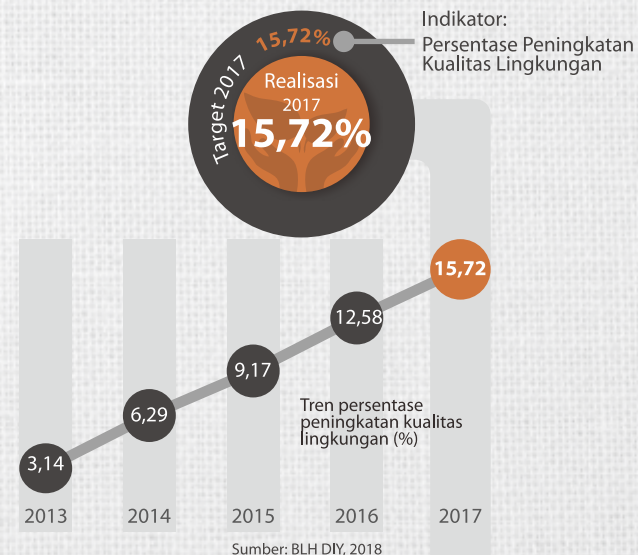
Selain itu, adanya fenomena penurunan jumlah penumpang juga harus mendapatkan solusi. pola penyediaan angkutan umum tidak akan dapat menjawab seluruh problematika transportasi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, sehingga harus pula diusung pola pembenahan terhadap manajemen permintaan transportasi berupa pembatasan ruang, akses, ataupun jumlah kendaraan pribadi yang memiliki pertumbuhan sangat tinggi.

14. Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang dipotret dari dua komponen, yaitu Kualitas Air dan Kualitas Udara.

ARAS		
BOD (11 Sungai DIY)	7,0 mg/l	8,0 mg/l
COD (11 Sungai DIY)	14,2 mg/l	40 mg/l
KADAR COLI (11 Sungai DIY)	25.061 MPN/100ml	75.000 MPN/100ml
CO (udara ambien)	829,19 µg/m ³	<13.000 µg/m ³
HC (udara ambien)	16,74 µg/m ³	<140 µg/m ³

- Indikator peningkatan kualitas air diperoleh dari rata-rata persentase capaian parameter BOD, COD dan Koli Tinja.
- Indikator Peningkatan kualitas udara diperoleh dari rerata persentase capaian parameter CO dan HC.



Permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup; dan (2) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan untuk melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang telah disepakati serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap yang mencemari atau merusak lingkungan.

Upaya yang perlu dilakukan antara lain: (1) Melakukan pendampingan pada kelompok masyarakat secara berkelanjutan; dan (2) Melakukan pemantauan dan pembinaan secara rutin dan menyeluruh terhadap para pelaku usaha atau kegiatan.

15. Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali

Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali diukur menggunakan indikator kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang paling tinggi pada kawasan cagar alam dan kawasan pertanian lahan kering sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang RTRW DIY sebesar 85,39% dengan tingkat kesesuaian paling tinggi pada keterwujudan sistem jaringan transportasi.

Pengendalian pemanfaatan ruang harus menjadi ujung tombak dalam mempertahankan

maupun meningkatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat diantaranya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya.

Permasalahan penataan ruang di DIY yaitu: (1) Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai acuan dalam perijinan; serta (2) Belum ditetapkannya instrumen pengendalian salah satunya peraturan mengenai tata cara pemberian insentif disinsentif. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu: (1) Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan kepada pemerintah

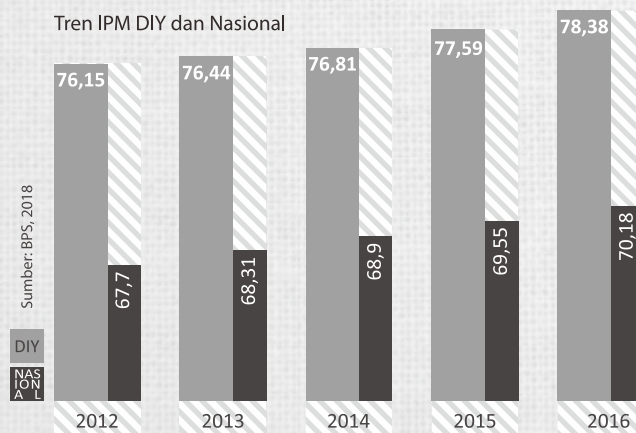


kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi serta sudah disusunnya peraturan gubernur untuk mekanisme pemberian persetujuan substansi RDTR kabupaten; dan (2) Percepatan penetapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya menjadi acuan operasional dalam pemberian ijin, pemberian insentif dan disinsentif serta peneraan sanksi.

B. Pencapaian Kinerja Lainnya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peningkatan IPM DIY sejalan dengan peningkatan indeks penyusunnya yang menunjukkan pola yang semakin membaik. Nilai Indeks Harapan Hidup yang selalu memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan IPM DIY menunjukkan peningkatan. Demikian juga Indeks Pendidikan yang memiliki kontribusi terendah terhadap pembentukan IPM DIY.



Kualitas pembangunan manusia di semua kabupaten/kota DIY selama periode 2010-2016 menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dari capaian nilai IPM semua kabupaten/kota yang meningkat. Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka IPM sebesar 85,32. Di sisi lain, Kabupaten Gunungkidul masih berada pada level terendah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender. Angka IPG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG DIY selalu berada di atas rata-rata nasional, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat keempat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan komponen penyusun IPG DIY tidak cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan IPG daerah lain.



IPG Kota Yogyakarta merupakan yang terbaik dibandingkan kabupaten lain di DIY –bahkan pada tahun 2015 menempati peringkat keempat terbaik tingkat nasional–. Namun capaian IPG Kota Yogyakarta pada tahun 2015 mengalami penurunan sehingga perlu mendapat perhatian. IPG Kabupaten Sleman juga menurun walaupun tidak signifikan.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan.

Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs disusun sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian target SDGs. RAD SDGs DIY disusun secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pencapaian target-target yang ditetapkan. Pemda DIY memiliki komitmen kuat dalam

upaya mewujudkan tercapainya target SDGs pada Tahun 2030. Integrasi tujuan-tujuan SDGs tersebut dapat dicermati pada RPJMD DIY 2017-2022 dalam bentuk strategi dan arah kebijakan.

C. Akuntabilitas Keuangan



Realisasi Anggaran

Target kinerja sasaran yang ingin diwujudkan di tahun 2017, dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan baik program strategis yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran, maupun program/kegiatan yang bersifat *supporting* (pendukung).

Realisasi yang relatif rendah pada sasaran Harapan hidup masyarakat disebabkan oleh sisa anggaran pada BLUD pada tahun sebelumnya

diakumulasikan ke dalam tahun anggaran berjalan. Sesuai mekanisme penganggaran BLUD, anggaran sisa tahun 2016 dialokasikan untuk program/kegiatan tahun 2017 dimana pelaksanaan tahun 2017 sudah tercapai target dan terdapat sisa anggaran dari BLUD yang selanjutnya akan digunakan untuk APBD 2018.

Analisis Efisiensi

Dari 15 sasaran strategis, terdapat 9 sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi yaitu:

1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat, telah mencapai kinerja sebesar 100,3% dengan efisiensi anggaran 5,12%;
2. Daya Saing Pendidikan meningkat, telah mencapai kinerja sebesar 100,12% dengan efisiensi anggaran 6,84%;
3. Harapan hidup masyarakat meningkat, telah mencapai kinerja sebesar 101,71% dengan efisiensi anggaran 37,28%;
4. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat telah mencapai kinerja sebesar 105,91% dan 102,84% dengan efisiensi anggaran 6,35%;
5. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat, telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 11,01%;
6. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat, telah mencapai kinerja sebesar

100% dengan efisiensi anggaran 6,57%;

7. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan, telah mencapai kinerja sebesar 100,02% dengan efisiensi anggaran 7,25%;
8. Kualitas lingkungan hidup meningkat, telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 8,79%;
9. Pemanfaatan Ruang terkendali, telah mencapai kinerja sebesar 115,97% dengan efisiensi anggaran 0,75%.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi belanja pendukung, antara lain: perjalanan dinas, kebijakan pembatasan makan-minum rapat saat Bulan Puasa, sisa pelaksanaan kegiatan, honor peserta rapat, belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar kendaraan, dan belanja listrik.



“

Berpikirlah selangkah lebih maju, atau perubahan akan bergerak lebih cepat dari sekedar apa yang kita pikirkan. Janganlah jadi penonton, tetapi jadilah pemain yang mampu dikenang oleh generasi penerus.

- Sri Sultan HB X -

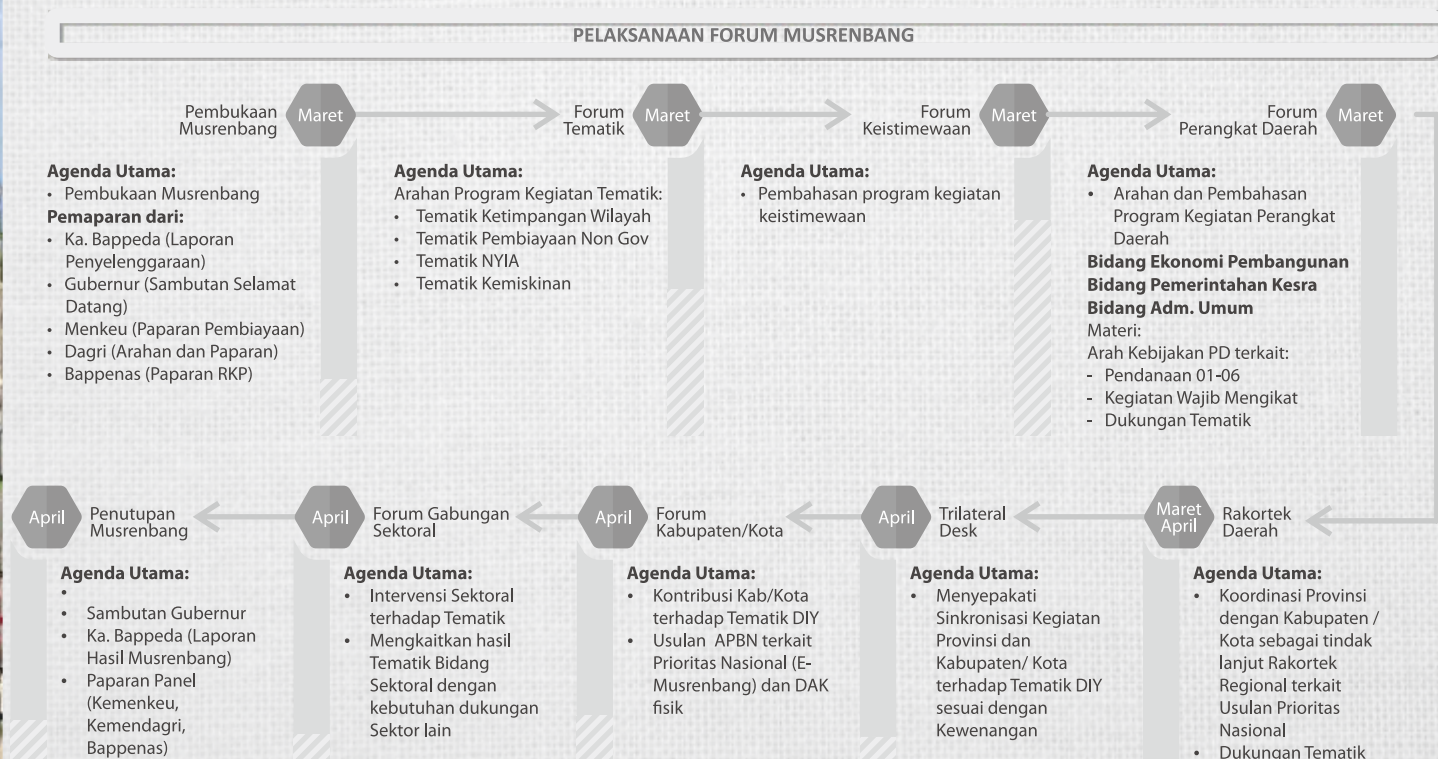
**Inovasi
Daerah**



Paradigma pembangunan yang terus berkembang dan adanya keterbatasan menjadi tantangan Pemerintah dalam pembangunan, hal tersebut menuntut Pemda DIY selalu melakukan langkah strategis berupa inovasi-inovasi dalam melaksanakan pembangunan supaya layanan Pemda DIY kepada masyarakat menjadi maksimal. Komitmen Pemda DIY yang tinggi ditunjukkan dengan memunculkan inovasi-inovasi dalam bentuk kebijakan maupun teknis operasional.

A. Revitalisasi Musrenbang Pemda DIY

Musrenbang sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD menjadi wahana antarpihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai wujud dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Dengan tidak mengesampingkan aturan baku yang sudah ditetapkan, desain pelaksanaan musrenbang RKPD di DIY mengalami modifikasi mekanisme. Sebagai contoh pelaksanaan Forum Tematik, Forum



Keistimewaan, Forum Perangkat Daerah, Forum *Trilateral Desk*, Forum Gabungan Kabupaten/Kota, dan Forum gabungan Sektoral. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang yang berbeda dengan daerah lain dilaksanakan dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi yang harapannya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di DIY.

B. Penerapan e-Performance Based Budgeting

Kemajuan teknologi, tuntutan layanan publik, peningkatan daya saing menjadi alasan penerapan *e-Government* yang bertujuan untuk menciptakan Sistem Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif, efisien. Salah satu langkah strategis Pemda DIY dalam melaksanakan *e-Government* adalah penerapan *e-Performance Based Budgeting* dimulai dari perencanaan (<http://jogjaplan.com>), penganggaran (SIPKD), dan pengendalian pelaksanaan pembangunan (<http://sungguh.jogjaprovo.go.id>).

Sistem informasi perencanaan (jogjaplan.com) yang diterapkan di DIY didesain untuk meningkatkan kualitas perencanaan. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah satu kriteria kualitas dokumen perencanaan. RPJMD menjadi

Basis penyusunan *database* sistem *Jogjaplan* sehingga tahapan pencapaian sasaran RPJMD akan lebih konsisten karena penyusunan rencana pembangunan tahunan secara bertahap selalu mengacu pada *database* yang sama. SIPKD menjadi alat bantu pengelolaan APBD dengan penganggaran dan pengelolaan keuangannya. Pada tahap pelaksanaan, *Sungguh* menjadi alat bantu pengendalian pelaksanaan APBD dalam hal kesesuaian pelaksanaan APBD meliputi: kesesuaian dengan Indikator Kinerja Utama, kesesuaian dengan Renstra SKPD, Kesesuaian dengan Perjanjian Kinerja eselon II (capaian IKU OPD), eselon III (capaian program), dan eselon IV (capaian kegiatan). Kesesuaian capaian dimaksud digunakan sebagai dasar penilaian kinerja OPD yang diimplementasikan dalam bentuk Laporan kinerja OPD.

C. Sistem Informasi Meta Data Spasial Daerah (MDSD)

Sistem Informasi MDSD dibangun untuk mendukung kebijakan Nasional terkait kebijakan Satu Peta. MDSD dengan alamat akses <http://gis.jogjaprovo.go.id>, berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar-pengguna sistem dan sebagai media koordinasi pengguna data spasial di DIY. Masyarakat umum dapat mengunduh peta digital melalui sistem MDSD sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas penyediaan data spasial



(keruangan) kepada publik. Publik dapat mengakses data melalui sistem MDSD dan mengambil manfaat dari data dan informasi spasial yang terkandung di dalamnya.

Dengan memanfaatkan MDSD koordinasi pemetaan di daerah akan menghasilkan dan informasi spasial yang lebih berkualitas. OPD pembuat data spasial di lingkungan Pemda DIY diwajibkan untuk mengunggah datanya ke Sistem MDSD untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat umum untuk kepentingan publik.

D. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis)

Tingkat kemiskinan DIY yang masih tinggi memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif. Diperlukan alat bantu perencanaan penanggulangan kemiskinan yang berfungsi untuk mengelola program/kegiatan penanggulangan kemiskinan supaya lebih tepat sasaran. Simnangkis DIY memiliki data agregat Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang bisa diperbarui. Pemanfaatan Simnangkis diharapkan meningkatkan kualitas koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan



Pemerintah, Pemda DIY, dan Kabupaten/Kota. Pemanfaatan PBDT pada Simnangkis dengan tujuan memperoleh informasi terkini rumah tangga dan individu yang dapat digunakan sebagai basis penetapan sasaran kepesertaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada skala nasional dan daerah, sehingga efektivitas dan akurasi intervensi pemerintah lebih baik, tidak terjadi tumpang tindih program kegiatan dengan sasaran yang sama, pembagian peran yang jelas antar pelaku yang menjalankan kewenangan penanggulangan kemiskinan.

E. Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Simbosda)

Pelaksanaan Program BOSDA sebagian masih dijalankan secara *manual* sehingga dimungkinkan adanya *human error* pada saat *entry data*. Di samping itu, dalam pelaksanaan program BOSDA ditemukan beberapa hambatan teknis seperti: 1) Akurasi data yang



F. Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka

Perpustakaan Grhatama Pustaka hadir sebagai sebuah *Learning Center* di DIY yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi masyarakat luas atau berkonsep kreatif edukatif.

Layanan istimewa perpustakaan di Grhatama Pustaka yaitu dengan adanya penambahan jam buka layanan yang telah diterapkan; tersedianya fasilitas layanan kreatif baru yaitu Bioskop/Cinema, Layanan Khusus Anak (Ruang Koleksi Anak, Ruang Bermain Anak, Ruang Mendongeng, dan Ruang Musik); Ruang Pameran; Layanan Koleksi Braille; *Coffeeshop/Cafeteria*; Ruang Audio Visual; Auditorium; dan Ruang Baca yang representatif. Sebagai perpustakaan daerah, Grhatama Pustaka tentu saja dapat dimanfaatkan semua kalangan masyarakat di DIY meliputi usia anak, remaja, dewasa, orang tua maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus.

Penerapan inovasi-inovasi di Grhatama Pustaka telah menunjukkan tren positif ditandai dengan: 1) Meningkatnya jumlah kunjungan; 2) Meningkatnya jumlah pendaftar anggota perpustakaan; 3) Meningkatnya jumlah pinjaman koleksi; 4) Meningkatnya kepuasan pengunjung; dan 5) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat khususnya anak-anak dan masyarakat dengan kebutuhan khusus (tunanetra).

rendah, sehingga perlu verifikasi yang berulang-ulang; 2) Pelapor BOSDA (Bendahara sekolah) tidak terlayani dengan baik karena keterbatasan SDM; 3) Pelapor BOSDA harus datang sendiri dengan menempuh jarak yang jauh untuk mengirimkan laporan. Secara umum permasalahan sebelum adanya sistem adalah tidak ada efisiensi waktu dan jarak. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan BOSDA yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* program.

Pemanfaatan Simbosda menunjukkan efisiensi dan efektivitas waktu untuk proses pengajuan BOSDA DIKDASMEN kemudahan *stakeholder* menjalankan aktivitasnya sesuai tugas yang diemban dalam menjalankan program BOSDA. Pemantauan dan evaluasi lebih cepat dilakukan sehingga ketika dibutuhkan tindakan-tindakan koreksi dalam pelaksanaan program BOSDA juga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.



G. Sistem Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Satu Pintu Pada BLPT Dinas Dikpora DIY (Integrated Service System- ISS)

ISS pada Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY adalah sebuah Sistem manajemen informasi yang secara detail dan interaktif memberikan kemudahan bagi *stakeholder* yang terlibat dalam satu rangkaian kegiatan pelayanan BLUD pada Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY. Sistem Manajemen Informasi berbasis internet yang dimaksud adalah sebuah Sistem Portal satu pintu dimana *stakeholder* bisa mengakses seluruh informasi yang berkaitan dengan: 1) Informasi Umum mengenai Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY sebagai BLUD; 2) Pelayanan Diklat, di dalamnya meliputi : Proses Registrasi (pendaftaran), Biaya/ Tarif Diklat, Jenis Paket Diklat, Tenaga Pengajar/Instruktur, Fasilitas Diklat, Informasi Bengkel, Asrama dan juga Jadwal Diklat, *e-learning*; dan 3) Informasi


mengenai Unit Produksi dan Jasa meliputi: Jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilayani, serta dokumen MoU (Nota Kesepahaman) sebagai langkah awal Komitmen Pelayanan.

Penerapan ISS telah membawa perubahan antara lain : 1) Tata kelola Diklat lebih efisien; 2) Panjangnya rantai birokrasi dapat diperpendek sehingga peningkatan dalam manajemen proses pelayanan baik secara individu dan lembaga lebih terukur, sistematis; 3) Memudahkan dalam analisa *monitoring* terhadap proses pelayanan diklat yang dilaksanakan. 4) Terjadi peningkatan produktivitas kerja dari personal serta lembaga; dan 5) Masyarakat dapat memantau, mengawal dan berpartisipasi secara lebih riil dalam perencanaan.



Penutup





Selama Tahun 2017, berbagai pencapaian dan keberhasilan telah diraih oleh Pemda DIY. Berbagai capaian dan keberhasilan tersebut tidak semata-mata ditunjukkan dengan angka-angka hasil pengukuran kinerja dengan segala data pendukungnya, tetapi ditunjukkan pula dari tren pencapaian dari tahun ke tahun dan bagaimana kontribusinya terhadap target akhir RPJMD. Angka-angka capaian tersebut bukan hasil suatu kebetulan tetapi merupakan buah dari komitmen, kerja keras dan inovasi dari semua pihak untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meskipun sebagaimana besar capaian indikator telah tercapai, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemda DIY ke depan. *Pertama*, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Beberapa persoalan tersebut antara lain tercermin dari Indeks Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) dimana tingkat kesenjangannya menjadi semakin lebar, Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah yang perlu terus-menerus diperkecil dengan lebih memberi penguatan kepada Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Tantangan mewujudkan kepariwisataan yang berdayasaing tinggi dengan meningkatkan

lama tinggal wisatawan baik nusantara maupun mancanegara sesuai dengan target. Pemda DIY harus hadir untuk memastikan adanya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan berbagai pihak dalam pembangunan.

Kedua, perlunya terus meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi antara Pemda DIY dengan berbagai unsur. Tanpa terwujudnya koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dengan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan *Performance Report*, hasil evaluasi capaian kinerja ini penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemda DIY untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Keempat, kinerja pelayanan langsung kepada masyarakat belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan terus-menerus.

Selanjutnya untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemda DIY, terdapat beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain: (1) Melakukan penataan struktur kelembagaan untuk efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan berkomitmen pada semangat "*Vision Driven Organization*", melalui pembangunan *logical framework* atas penyusunan *cascading* yang rasional dan terukur, (2) Konsisten melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan disertai dengan meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi dengan semua pihak; (3) Meningkatkan komitmen dari seluruh OPD untuk memperhatikan rumusan faktor pendorong dan penghambat dalam upaya mewujudkan indikator sasaran dengan mengakomodir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan (4) Meningkatkan kinerja pelayanan langsung kepada masyarakat.







**Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Bappeda DIY**

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811
(Psw. 1209 - 1220, 1243 - 1246, 1253), 511185 Fax. 0274 - 586712
<http://bappeda.jogjaprov.go.id>
Yogyakarta
55213

